

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan paling awal sebelum memasuki bagian selanjutnya (tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran). Bab ini menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini serta tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Empat Lawang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui. Rancangan Undang Undang (UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan) pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang Bersama 15 kabupaten/ kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang memiliki banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya yaitu Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD sangat berperan aktif dalam mengelola seluruh aset daerah, Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset daerah atau merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset adalah barang yang dalam pengetahuan hukum disebut benda, yang terdiri benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan, sedangkan barang bergerak baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Aset dapat berarti kekayaan (harta kekayaan) atau aktiva atau *property* yang meliputi “ semua pos pada jalur debet suatu neraca yang terdiri harta, piutang, biaya yang dibayar lebih dahulu dan pendapatan yang masih harus diterima. Dalam penggunaan aset, aset tersebut perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat digunakan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Jika aset daerah tidak dikelola secara optimal, maka biaya pengeluaran atas pemeliharaan aset kemungkinan akan lebih besar bila dibandingkan dengan biaya penerimaan atas pendapatan yang dihasilkan. Dalam kegiatan perekonomian, manajemen aset merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengelola ekonomi daerah. Menurut Siregar (2004 : 518 – 519) Kegiatan manajemen aset terdiri dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Pengelolaan aset daerah yang tepat dapat membuat aset tersebut bernilai ekonomis dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Menurut Siregar (2004 : 518) Inventarisasi terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik aset terdiri dilakukan untuk mengetahui informasi berkaitan dengan aset. Informasi yang didapat dari hasil inventarisasi biasanya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merek dan harga perolehan. Sedangkan aspek yuridis mencakup status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Dengan adanya informasi yang lengkap, jelas dan akurat mengenai aset tersebut, akan mempermudah pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Litasari (2018) yang berjudul “ Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur “ menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Inventarisasi Aset dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Kolaka Timur. Menurut Litasari (2018:12) menyatakan bahwa dalam Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu adanya identifikasi dan inventarisasi aset daerah lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dalam penelitian yang dilakukan Jusmin Nursalim (2018) juga menunjukkan inventarisasi aset memiliki tingkat pengaruh paling tinggi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil penelitiannya menyarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong harus lebih meningkatkan kinerja dalam inventarisasi agar dapat memberika

informasi yang tepat dalam penilaian, pengawasan dan pengendalian aset di Kabupaten Sorong.

Setelah inventarisasi aset, salah satu langkah lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yaitu legal audit. Menurut Siregar (2004 : 519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Legal audit dilakukan supaya setiap aset yang ada di Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki status kepemilikan yang jelas sehingga dapat mencegah penyerebotan aset dari orang – orang yang tidak mau bertanggung jawab, yang ingin mengambil aset milik pemerintah daerah tersebut. Ada beberapa dokumen kepemilikan aset tersebut yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan dinas baik itu kendaraan beroda dua maupun kendaraan yang beroda empat, dan sertifikat bagi tanah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ester Agustina (2017) tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Paniai menunjukkan bahwa legal audit aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. Agustina menyarankan bahwa Pemerintah di Kabupaten Paniai perlu meningkatkan pengelolaan aset legal audit dengan cara melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang ada di Kabupaten Paniai sehingga dapat meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah tersebut.

Selain dari inventarisasi aset dan legal audit, tahap kegiatan manajemen aset yang berikutnya adalah penilaian aset. Menurut Sinegar (2004 : 519) menyatakan bahwa penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas yang dikuasai. Biasanya kegiatan penilaian ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Dalam penelitian Umbora (2018) mengenai pengelolaan aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen menunjukkan bahwa penilaian aset memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Umbora, ia memberi saran bahwa perlunya pemerintah daerah harus lebih waspada dan lebih peka untuk melengkapi dokumen serta bukti kepemilikan dari aset - aset yang ada di pemerintah daerah.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 tercatat mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Berikut ini merupakan tabel hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang :

Tabel 1.1.
Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Empat Lawang

Tahun	Opini
2010	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa opini terkait LKPD Kabuapten Empat Lawang mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Empat Lawang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP). Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Empat Lawang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Meskipun dalam hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan, Kabupaten Empat Lawang memiliki permasalahan dalam pengelolaan aset. Berdasarkan sumber informasi yang telah diperoleh, peneliti menemukan adanya permasalahan mengenai manajemen aset

yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah masih banyak aset yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) di Kabupaten Empat Lawang. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya pemahaman pemerintah dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Selain itu, pencatatan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang masih ada yang bernilai Rp 0.00, tidak memiliki informasi bukti kepemilikan dan lokasi aset tetap. Berikut ini merupakan rincian aset tetap Kabupaten Empat Lawang yang nilainya masih Rp 0 atau Rp.1 dan aset tetap yang keberadaannya tidak diketahui ;

1. Sebanyak 24 unit peralatan dan mesin milik Dinas Kesehatan, Disperindag, dan Dinas Pertanian yang diperoleh pada tahun 2008, tahun 2010, dan tahun 2012.
2. Sebanyak satu ruas jalan, irigasi, dan jaringan milik Dinas PUPR yang diperoleh pada tahun 2015.
3. Sebanyak tiga unit aset tetap lainnya milik Disperindag yang diperoleh pada tahun 2009.
4. Terdapat 45 unit kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya bukti kepemilikannya.

Berdasarkan hal tersebut, kondisinya dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 5, ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik berwenang dan bertanggung jawab diantaranya, menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Inventarisasi Aset,**

Legal Audit Aset, Penilaian Aset Dan Kondisi Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang ” .

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan objek penelitian pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Kabupaten Empat Lawang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdahulu, dinyatakan rumusan masalah adalah ;

1. Bagaimana pengaruh inventarisasi aset secara parsial terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana pengaruh legal audit secara parsial terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Empat Lawang ?
3. Bagaimana pengaruh penilaian aset secara parsial terhadap optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Empat Lawang ?
4. Bagaimana pengaruh kondisi aset secara parsial terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset di Kabupaten Empat Lawang ?
5. Bagaimana pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Empat Lawang ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian mencakup Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset dan kondisi aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan disiplin ilmu pengetahuan tentang manajemen aset ditinjau dari konsep inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset dan kondisi aset.